

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENGGUNAKAN
RASIO KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023-2025

Nur Fania Hilda Prima Anggraini

Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bina Sarana InformatikaEmail: nurfaniahildaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan rasio keuangan daerah tahun 2023-2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif non-statistik dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan studi pustaka digunakan sebagai landasan teoritis dan pendukung pembahasan, bukan sebagai teknik pengumpulan data utama. Analisis dilakukan melalui perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, serta rasio aktivitas yang meliputi belanja operasi dan belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada kategori sangat rendah, tetapi meningkat dari 16,23% pada 2023 menjadi 17,68% pada 2025. Rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 102,75%. Rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien pada 2023 dan kurang efisien pada 2024-2025, meskipun trennya membaik. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa belanja operasi lebih dominan, sedangkan proporsi belanja modal cenderung menurun. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul cukup baik pada aspek efektivitas, tetapi kemandirian, efisiensi, dan keseimbangan alokasi belanja masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas.

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan agar sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah dapat digunakan secara tepat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan data keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Saputra & Priyastiwi, 2026).

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja serta menjadi dasar dalam mengevaluasi kondisi keuangan daerah (Maylani & Siswanto, 2022).

Salah satu indikator dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer. Semakin tinggi tingkat kemandirian menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya dengan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Sebaliknya, tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Kondisi kemandirian keuangan yang rendah masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Hapsari et al., 2025).

Selain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi juga digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, rasio efisiensi digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui pencapaian target pendapatan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan anggaran secara efisien. Hasil penelitian Sukmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat berada pada kategori efektif, sedangkan tingkat kemandirian masih perlu ditingkatkan.

Rasio aktivitas juga menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pola alokasi belanja daerah. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui proporsi penggunaan belanja daerah, khususnya antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berkaitan dengan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, sedangkan belanja modal berkaitan dengan pengeluaran untuk memperoleh atau membangun aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Perbandingan kedua jenis belanja tersebut dapat memberikan gambaran mengenai prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis rasio aktivitas diperlukan untuk melengkapi penilaian terhadap kinerja keuangan daerah secara menyeluruh (Cendra, 2025).

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data LRA Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah melalui berbagai rasio keuangan. Berdasarkan data yang tersedia, struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer yang menjadi bagian penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta pola alokasi belanja daerah selama periode penelitian.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penelitian Utari et al. (2023) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Barat" menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi, sedangkan rasio efektivitas berada pada kategori efektif meskipun mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah dapat memiliki kondisi yang berbeda dalam satu objek penelitian.

Selanjutnya, penelitian Sukmawati et al. (2025) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi" menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berada pada kategori cukup baik. Rasio efektivitas tergolong efektif, sedangkan rasio kemandirian masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian efektivitas pendapatan belum secara langsung menunjukkan tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian lainnya, yaitu Praditya & Yusuf (2025) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan", menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif, sedangkan rasio kemandirian masih rendah sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, Setyabudi et al. (2025) dalam penelitian yang berjudul "Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati" menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah tergolong baik, tetapi rasio kemandirian masih rendah sehingga diperlukan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa analisis rasio keuangan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi hasilnya dapat berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak hanya dapat dilihat dari satu indikator, karena suatu daerah dapat memiliki efektivitas pendapatan yang baik tetapi tingkat kemandirian yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menggunakan beberapa rasio secara bersamaan agar kondisi kinerja keuangan daerah dapat digambarkan secara lebih menyeluruh.

Meskipun penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023-2025 dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas masih perlu dilakukan. Perbedaan karakteristik keuangan dan kondisi masing-masing pemerintah daerah menyebabkan hasil penelitian pada daerah lain belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data keuangan pada periode 2023-2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dalam menambah kajian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2023-2025."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan analisis rasio keuangan daerah tahun 2023-2025?
2. Bagaimana pola alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan rasio aktivitas tahun 2023-2025?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan analisis rasio keuangan daerah tahun 2023-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan analisis rasio keuangan daerah tahun 2023-2025.
2. Mengetahui pola alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan rasio aktivitas tahun 2023-2025.
3. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan analisis rasio keuangan daerah tahun 2023-2025.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah berkaitan dengan sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks analisis laporan keuangan, pengelolaan pendapatan dan belanja menjadi bagian penting untuk melihat kondisi fiskal daerah. Maylani dan Siswanto (2022) menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif dan efisien.

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Harahap (2024) menjelaskan bahwa analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk menilai kondisi pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran melalui rasio membantu memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai kemampuan pendapatan, pengendalian belanja, dan struktur alokasi anggaran.

2.1.3 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan pemerintahan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pendapatan transfer. Ardiansyah (2023) menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkaitan dengan peningkatan kemampuan kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini, semakin tinggi

rasio menunjukkan semakin besar kemampuan daerah membiayai kebutuhan keuangannya dari sumber pendapatan sendiri.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD} / \text{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

2.1.4 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk membandingkan realisasi PAD dengan target PAD yang telah ditetapkan. Utari et al. (2023) dan Praditya dan Yusuf (2025) menggunakan rasio efektivitas untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan. Nilai rasio di atas 100% menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$$

2.1.5 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Setyabudi et al. (2025) menjelaskan bahwa semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan anggaran dibandingkan pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

2.1.6 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk melihat pola prioritas alokasi belanja daerah, terutama perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal. Maylani dan Siswanto (2022) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai prioritas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pakaya et al. (2025) juga menggunakan analisis keuangan daerah untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara berkelanjutan.

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Operasi} = \text{Belanja Operasi} / \text{Total Belanja} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \text{Belanja Modal} / \text{Total Belanja} \times 100\%$$

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding untuk melihat persamaan, perbedaan, dan posisi penelitian ini. Penelitian dipilih dari sumber yang tercantum dalam daftar pustaka artikel.

Tabel 1. Penelitian Relevan

Peneliti	Judul	Metode/Fokus	Hasil Utama
Utari et al. (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Barat	Rasio keuangan; LRA	Kemandirian rendah; efektivitas efektif

Sukmawati et al. (2025)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2021-2023	Deskriptif kuantitatif; rasio keuangan	Efektivitas efektif; kemandirian perlu ditingkatkan
Praditya & Yusuf (2025)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023	Kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas	Efektivitas sangat efektif; kemandirian masih rendah
Setyabudi et al. (2025)	Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio keuangan daerah	Efisiensi baik; kemandirian masih rendah
Maylani & Siswanto (2022)	Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan dan rasio	Rasio mampu menggambarkan kondisi fiskal daerah
Cendra (2025)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023	LRA dan rasio keuangan	Kinerja dapat dinilai melalui rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi
Pakaya et al. (2025)	Analisis Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Gorontalo	Rasio keuangan daerah	Rasio menggambarkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta periode pengamatan 2023-2025. Penelitian ini menggabungkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, serta aktivitas belanja operasi dan belanja modal dalam pendekatan kuantitatif deskriptif non-statistik.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif non-statistik. Data berbentuk angka dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dihitung menggunakan rumus rasio keuangan

daerah, kemudian hasilnya dideskripsikan dan dibandingkan antarperiode. Penelitian tidak menggunakan pengujian hipotesis atau statistik inferensial.

3.2 Objek, Populasi, dan Sampel

Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi penelitian berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dipublikasikan melalui BKAD. Sampel penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2023-2025 yang memenuhi ketersediaan data untuk seluruh perhitungan rasio.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa LRA Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2025. Data diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Data yang digunakan meliputi PAD, target PAD, pendapatan transfer, realisasi pendapatan, realisasi belanja, belanja operasi, belanja modal, dan total belanja.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat data LRA Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2025 dari sumber resmi BKAD. Studi pustaka tidak ditempatkan sebagai teknik pengumpulan data utama, tetapi digunakan untuk memperoleh landasan konseptual, mendukung pemilihan indikator rasio, dan membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kuantitatif deskriptif non-statistik melalui perhitungan lima indikator rasio, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas belanja operasi, dan aktivitas belanja modal. Hasil setiap tahun dibandingkan untuk melihat kecenderungan meningkat atau menurun, kemudian ditarik kesimpulan sesuai kriteria yang digunakan dalam penelitian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD} / \text{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Operasi} = \text{Belanja Operasi} / \text{Total Belanja} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \text{Belanja Modal} / \text{Total Belanja} \times 100\%$$

$$\text{Rata-rata Rasio} = (\text{Rasio 2023} + \text{Rasio 2024} + \text{Rasio 2025}) / 3$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data penelitian berasal dari LRA Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2025. Data pokok yang digunakan meliputi PAD, pendapatan transfer, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, total belanja, target PAD, dan realisasi pendapatan.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2023	262.240.187.152,00	277.318.850.589,86
2024	290.925.625.113,00	301.193.377.089,18
2025	300.403.250.322,00	303.274.173.192,56

Realisasi PAD meningkat setiap tahun. Tahun 2023 sebesar Rp277.318.850.589,86 meningkat menjadi Rp301.193.377.089,18 pada 2024 atau naik 8,61%. Pada 2025 realisasi kembali meningkat menjadi Rp303.274.173.192,56 atau naik 0,69% dari 2024. Secara keseluruhan, realisasi PAD meningkat 9,36% dari 2023 sampai 2025, meskipun laju peningkatan melambat pada 2025.

Tabel 3. Pendapatan Transfer Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)
2023	1.708.712.069.515,00
2024	1.812.202.227.483,00
2025	1.715.610.316.038,00

Pendapatan transfer tetap menjadi sumber pendapatan yang besar selama periode penelitian. Kondisi ini berkaitan dengan hasil rasio kemandirian yang masih berada pada kategori sangat rendah.

Tabel 4. Data Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Komponen	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Belanja Operasi	1.459.831.749.104,10	1.617.993.629.309,00	1.567.323.109.451,93
Belanja Modal	177.916.134.671,00	142.771.879.045,00	117.209.316.906,00
Belanja Tidak Terduga	235.998.075,00	296.252.086,00	142.000.000,00
Belanja Transfer	362.916.857.900,00	330.986.177.775,00	336.100.295.134,00
Total Belanja	2.000.900.739.750,10	2.092.047.938.215,00	2.020.775.121.491,93

4.2 Analisis Rasio Keuangan Daerah

4.2.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan perbandingan PAD dengan pendapatan transfer. Perhitungan digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membiayai kebutuhan daerah dari sumber pendapatan sendiri.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD} / \text{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun 2023-2025

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio	Kriteria
2023	277.318.850.589,86	1.708.712.069.515,00	16,23%	Sangat rendah
2024	301.193.377.089,18	1.812.202.227.483,00	16,62%	Sangat rendah
2025	303.274.173.192,56	1.715.610.316.038,00	17,68%	Sangat rendah

Rasio kemandirian meningkat dari 16,23% pada 2023 menjadi 16,62% pada 2024 dan 17,68% pada 2025. Meskipun terdapat peningkatan, seluruh nilai masih berada pada kategori sangat rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan transfer masih kecil sehingga ketergantungan terhadap transfer masih tinggi. Temuan ini sejalan dengan Utari et al. (2023), Praditya dan Yusuf (2025), serta Hapsari et al. (2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian masih berkaitan dengan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer.

4.2.2 Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$$

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2023-2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio	Kriteria
2023	277.318.850.589,86	267.240.187.152,00	103,77%	Sangat efektif
2024	301.193.377.089,18	290.925.625.113,00	103,53%	Sangat efektif
2025	303.274.173.192,56	300.403.250.322,00	100,96%	Sangat efektif

Rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif selama tiga tahun. Nilai rasio turun tipis dari 103,77% pada 2023 menjadi 103,53% pada 2024 dan 100,96% pada 2025, tetapi tetap di atas 100%. Artinya, realisasi PAD mampu mencapai bahkan melampaui target setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD relatif baik. Hasil ini sejalan dengan Utari et al. (2023), Sukmawati et al. (2025), dan Praditya dan Yusuf (2025) yang menemukan efektivitas pendapatan daerah pada kategori baik hingga sangat efektif.

4.2.3 Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2023-2025

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio	Kriteria
2023	2.000.900.739.750,10	1.992.172.404.395,86	100,44%	Tidak efisien
2024	2.092.047.938.215,00	2.114.096.687.194,18	98,96%	Kurang efisien
2025	2.020.775.121.491,93	2.067.760.449.851,56	97,73%	Kurang efisien

Rasio efisiensi membaik selama periode penelitian, yaitu turun dari 100,44% pada 2023 menjadi 98,96% pada 2024 dan 97,73% pada 2025. Penurunan rasio menunjukkan bahwa realisasi belanja semakin terkendali dibandingkan realisasi pendapatan. Namun, hasil 2023 masih berada pada kondisi tidak efisien dan 2024-2025 masih kurang efisien. Temuan ini sejalan dengan Setyabudi et al. (2025) dan Elis dan Munandar (2023) yang menekankan pentingnya pengendalian belanja agar penggunaan anggaran semakin optimal.

4.2.4 Rasio Aktivitas Belanja Operasi

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Operasi} = \text{Belanja Operasi} / \text{Total Belanja} \times 100\%$$

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Operasi Tahun 2023-2025

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio	Kriteria
2023	1.459.831.749.104,10	2.000.900.739.750,10	72,96%	Dominan operasional
2024	1.617.993.629.309,00	2.092.047.938.215,00	77,34%	Dominan operasional
2025	1.567.323.109.451,93	2.020.775.121.491,93	77,56%	Dominan operasional

Rasio aktivitas belanja operasi meningkat dari 72,96% pada 2023 menjadi 77,34% pada 2024 dan 77,56% pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah selama periode penelitian masih lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa struktur belanja masih berorientasi pada kebutuhan rutin pemerintahan.

4.2.5 Rasio Aktivitas Belanja Modal

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \text{Belanja Modal} / \text{Total Belanja} \times 100\%$$

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal Tahun 2023-2025

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio	Kriteria
2023	177.916.134.671,00	2.000.900.739.750,10	8,89%	Kurang efektif
2024	142.771.879.045,00	2.092.047.938.215,00	6,82%	Kurang efektif
2025	117.209.316.906,00	2.020.775.121.491,93	5,80%	Kurang efektif

Rasio aktivitas belanja modal menurun dari 8,89% pada 2023 menjadi 6,82% pada 2024 dan 5,80% pada 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja semakin kecil. Jika dikaitkan dengan meningkatnya dominasi belanja operasi, struktur alokasi belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih lebih berorientasi pada kebutuhan operasional dibandingkan investasi aset jangka panjang. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi agar alokasi belanja modal dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

4.3 Rekapitulasi Kinerja Keuangan

$$\text{Rata-rata Rasio} = (\text{Rasio 2023} + \text{Rasio 2024} + \text{Rasio 2025}) / 3$$

Tabel 10. Rekapitulasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Jenis Rasio	2023	2024	2025	Rata-rata	Kriteria
Rasio Kemandirian	16,23%	16,62%	17,68%	16,84%	Sangat rendah
Rasio Efektivitas	103,77%	103,53%	100,96%	102,75%	Sangat efektif
Rasio Efisiensi	100,44%	98,96%	97,73%	99,04%	Kurang efisien
Aktivitas Belanja Operasi	72,96%	77,34%	77,56%	75,95%	Dominan operasional
Aktivitas Belanja Modal	8,89%	6,82%	5,80%	7,17%	Kurang efektif

Rekapitulasi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki hasil yang berbeda pada setiap indikator. Rasio efektivitas menjadi indikator paling baik karena konsisten sangat efektif. Rasio kemandirian tetap sangat rendah walaupun

mengalami peningkatan. Rasio efisiensi menunjukkan perbaikan, tetapi belum mencapai kondisi efisien secara optimal. Pada rasio aktivitas, belanja operasi lebih dominan, sedangkan proporsi belanja modal menurun selama periode penelitian. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan perlunya penguatan PAD, pengendalian belanja, dan penyesuaian komposisi belanja agar lebih mendukung pembangunan jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sangat rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 16,23% menjadi 17,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer. Rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 102,75%, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD mampu mencapai dan melampaui target selama periode penelitian. Rasio efisiensi menunjukkan perbaikan dari 100,44% menjadi 97,73%, tetapi masih belum efisien secara optimal. Sementara itu, rasio aktivitas menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi alokasi belanja daerah dengan rata-rata 75,95%, sedangkan rasio aktivitas belanja modal rata-rata 7,17% dan cenderung menurun. Dengan demikian, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan cukup baik terutama dari sisi efektivitas PAD, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek kemandirian, efisiensi, dan keseimbangan alokasi belanja.

6. SARAN

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disarankan untuk terus meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah yang sah agar kemandirian keuangan meningkat dan ketergantungan terhadap transfer berkurang. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengendalian belanja agar efisiensi meningkat serta mengevaluasi komposisi belanja operasi dan belanja modal sesuai kebutuhan pembangunan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan menambahkan rasio keuangan daerah lainnya agar gambaran kinerja keuangan menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Riyans Ardiansyah Universitas Borneo Tarakan , Indonesia 1 . Pendahuluan Undang-undang no . 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa daerah diberik. Universitas Borneo Tarakan, Indonesia, 4(1), 92-106.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 26320-26332.
- Cendra. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023. Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), 11(2), 167-176.
- Elis, & Munandar, A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 - 2021. Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi - Vol. 15. No. 1 (2023), 15(1), 1-7.

- Ghefira, I., Paramita, D., Oktasyawitri, E. S., Damayanti, P., Syarifuddin, & Pahlevi, M. R. (2023). Desain E-LKPD Berbasis Project Based Learning Melalui Platform LiveWorksheet Terhadap Pembelajaran Sejarah Secara Hybrid Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 20 (2), 2023, 20(2), 54-61.
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran License. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154-164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Harahap, H. F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomipedia Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 179-190. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia>
- Juliansyah, E., & Insaniyah, M. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut). *Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi*, 05(01), 1-16.
- Maylani, D. A., & Siswanto. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 130-138. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Pakaya, S. N., Monoarfa, R., & Wuryandini, A. R. (2025). Analisis Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019-2023. *Jurnal Buana Akuntansi*, 10(01), 46-69.
- Praditya, R. A., & Yusuf, A. M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 Analysis of the Financial Performance of the Balikpapan City Regional Government in 2018-2023. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 45-54.
- Saputra, M. S., & Priyastiwi. (2026). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha , Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 14(1), 39-43. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.13325>
- Setyabudi, T. G., Iswara, U. S., Susanti, & Widyawati, D. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*, 36(3), 255-262.
- Sukmawati, A., Murnidayanti, S. A., Dahlia, & Permana, K. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2021-2023. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1832-1841. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26840>
- Utari, R., Nursyabani, A., In, H., Rizka, R. B., & Kurniawan, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eko-Bisma*, 2(2), 204-211.